

Peningkatan Kemampuan Aparat Dusun Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan

Hamirul

hrul@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo

ABSTRAK

Pelayanan yang terbaik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah melalui aparatnya atau dalam hal ini birokrasi, namun dalam setiap pelayanan seharusnya didukung oleh kemampuan aparat yang mumpuni dalam hal administrasi, dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara serta informan yang digunakan sebanyak 11 orang. Hasil penelitian Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa di Dusun Teluk Panjang belum maksimal dilaksanakan, belum maksimalnya pelaksanaan tersebut berdampak kepada rendahnya rekomendasi/hasil kerja yang dirasakan. Upaya peningkatan kemampuan Aparat Desa di Dusun Teluk Panjang terhambat dikarenakan kondisi pelaksanaan tugas pemerintahan desa disebabkan oleh beberapa faktor yang melingkupi aparat Dusun. Faktor-faktor yang dimaksud adalah minimnya keterampilan/kemampuan setiap Aparat Dusun sehubungan dengan tugas-tugas tersebut, masih rendahnya disiplin kerja ditinjau dari hasil kerja, minimnya pemberian bimbingan terhadap aparat, pengawasan dan, pengendalian yang tidak efektif, serta kondisi kerja yang kurang mendukung. Upaya peningkatan kemampuan aparat desa di Dusun Teluk Panjang dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, khususnya administrasi pemerintahan desa yang meliputi, pembinaan disiplin aparat, pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja dan pengembangan karir.

Kata Kunci: Peningkatan, Kemampuan, ASN, Pelaksanaan Tugas, Administrasi Pemerintahan.

ABSTRACT

The best service that should be provided by the government through its apparatus or in this case bureaucracy, but in each service should be supported by the ability of qualified personnel in administrative matters, using descriptive methods and qualitative approaches with interview data collection techniques and informants used by 11 people . The results of the research on the Implementation of Village Government Administration Tasks in Teluk Panjang Hamlet have not been maximally implemented, yet the maximum implementation has had an impact on the low recommendations / perceived work results. Efforts to increase the capacity of Village Officials in Teluk Panjang Hamlet were hampered because the conditions for implementing village government duties were caused by several factors surrounding the village officials. The factors in question are the lack of skills / abilities of each hamlet apparatus in connection with these tasks, the low level of work discipline in terms of work results, the lack of guidance to the apparatus, supervision and ineffective control, and unfavorable working conditions. Efforts to improve the capacity of village officials in Teluk Panjang Hamlet in carrying out government administrative duties, especially village government administration which includes, apparatus discipline development, education and training, work motivation and career development.

Keywords: Improvement, Capability, ASN, Task Implementation, Government Administration.

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah diyakini dari sebagian pihak menjadi salah satu alternative bagi masyarakat untuk mempercepat proses penjejahteraan diri. Sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 berimplikasi terhadap munculnya berbagai keinginan masyarakat di daerah untuk memekarkan diri, salah satunya adalah terbentuknya Pemerintah Kota Bima yang dimekarkan dari pemerintahan induk yakni Pemerintah Kabupaten Bima sekitar tahun 2002 silam melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002.

Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (pecahan dari Kota Bima). Berbagai ekspektasi rakyat untuk hidup lebih sejahtera dari masa-masa sebelumnya mulai bermunculan. Diikuti dengan lonjakan pelaksanaan berbagai program dan terobosan pembangunan sebagai sebuah wujud pemenuhan aspek kebutuhan rakyat dalam berbagai bidang guna perbaikan taraf kehidupan masyarakatnya. Dibalik berbagai upaya pada dua pemerintahan ini dalam melakukan terobosan pembangunan bagi

masyarakatnya. Masih terselip satu persoalan krusial yang masih menggelayut diantara keduanya yang perlu segera diselesaikan bersama yakni permasalahan menyangkut pemindahan Ibukota Kabupaten Bima ke wilayah Kecamatan Woha serta pembagian dan penyerahan asset daerah yang masih dikuasai oleh Kabupaten Induk.

Pemerintahan pada masa sekarang memiliki fungsi diantaranya memberikan pelayanan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memberikan pelayanan publik yang baik dan optimal (Rieseneder, 2008). Optimalisasi proses dan pelayanan (*service and process optimization*) merupakan salah satu komponen untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good government*) (Michigan Lean Consortium, 2013).

Alasan pemindahan ini dikarenakan beberapa faktor, yakni faktor strategi militer, informasi keamanan negara, Naypyitaw merupakan daerah yang lebih mudah dikontrol, faktor dekolonisasi, upaya untuk mengisolasi pusat pemerintahan dari jumlah penduduk yang besar, dan untuk mengikuti kepercayaan tradisional Myanmar (Myoe, 2006).

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan juga diartikan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau kelengkapan negara yang bisa bertindak untuk nama negara. Sedangkan pemerintah pada arti sempit (*bestuurvoering*), yaitu mencakup fungsi-fungsi organisasi yang menjalankan suatu tugas pemerintahan. Titik beratnya pemerintahan dalam arti yang sempit ini hanya saja berkaitan dengan kekuasaan yang bisa menjalankan fungsi eksekutif saja (Sadjiyono. 2008)

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. (Sarundajang, 2003:5)

Pemerintahan adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan (Ridwan, 2014). Pemerintahan adalah sebagai alat

kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara.

B. Pembentukan wilayah

Rustiadi, dkk, (2009) “Wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas yang spesifik (tertentu), dimana bagian -bagian dari wilayah tersebut (sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis, dalam hal ini wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan yang lainnya”.

Dari definisi tersebut tidak ada batasan spesifik dari suatu wilayah. Batasannya lebih bersifat “*meaningful*” untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian maupun evaluasi. Menurut Tukiyat (2002), “konsep pengembangan ekonomi wilayah harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menggali potensi produk unggulan daerah. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam kegiatan

pengembangan wilayah adalah menyusun perencanaan wilayah”.

Menurut Hamid (2008), ada beberapa faktor dan indikator untuk menentukan lokasi atau wilayah calon ibukota kabupaten yaitu meliputi:

- a) Faktor lingkungan makro adalah dorongan lingkungan baik dari dalam maupun dari luar.
- b) Faktor endowment daerah yaitu ketersediaan SDM yang memadai dan SDA yang potensial.
- c) Faktor budaya yang meliputi sifat dan perilaku masyarakat, adat istiadat yang memberikan dukungan terhadap penetapan ibukota kabupaten.

C. Faktor Lokasi Ibukota dan Pusat Pemerintahan

Menurut Siong (2006), Putra jaya dipilih sebagai lokasi pusat pemerintahan Malaysia yang baru dikarenakan beberapa faktor, yakni: (1) ketersediaan lahan yang masih cukup dan kalkulasi biaya infrastruktur yang lebih rasional, (2) lokasi strategis yang berada pada koridor pertumbuhan, (3) aksesibilitas yang baik dan jaringan transportasi, (4) jenis dan kerapatan vegetasi yang dapat mendukung kebijakan, (5) bentuk lahan, dan (6) dampak minimum terhadap masyarakat lokal.

Syarief (2013) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi dan perkembangan sebuah kota, yakni faktor geografis, jenis tanah, ketersediaan air, spekulasi tanah, keberadaan fasilitas, aksesibilitas, jumlah dan kepadatan penduduk, kebijakan perkotaan, pendapatan penduduk, dan keberadaan industri.

Beberapa faktor prasyarat dalam pembentukan daerah baru sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2007 diantaranya ialah kemampuan ekonomi, potensi daerah, keadaan sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Ali (2010) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pusat pemerintahan, yakni : (1) letak geografis yang strategis dan berada pada dataran rendah (< 3%), (2) ketersediaan lahan yang cukup, (3) penggunaan lahan yang bukan lahan pertanian, (4) status lahan, (5) bukan daerah rawan bencana, (6) ketersediaan sumberdaya air yang memadai, (7) aksesibilitas yang baik, (8) jumlah penduduk, (9) kepadatan penduduk, (10) heterogenitas masyarakat (ekonomi, agama, etnis), dan (11) ketersediaan fasilitas ekonomi dan sosial (rumah sakit,

air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik).

D. Pemindahan Ibukota

Fungsi-fungsi yang berada dalam sebuah ibukota mencakup fungsi Ekonomi, fungsi Sosial, dan fungsi Pemerintahan. Claval (2000) mengungkapkan pula bahwa kajian mengenai ibukota juga banyak dikaji oleh geograf, dimana pada ilmu geografi ibukota difokuskan pada pengertian sebuah tempat yang memiliki jumlah individu yang tinggi, tradisi yang kuat, wilayah dengan peninggalan historis dan monumen yang mencolok, serta wilayah tersebut terkadang memiliki nilai yang tinggi.

Sejalan dengan pengertian yang diutarakan oleh Claval, Wusten (2000) juga mengungkapkan bahwa ibukota diartikan sebagai pusat administrasi dan politik yang menjadi simbol kekuasaan yang didalamnya terdapat banyak fungsi dan hierarki yang berbeda, seperti fungsi pelayanan, fungsi agama, fungsi pemerintahan, dan fungsi militer. Dalam hal ini Qi (2008) juga mendefinisikan bahwa pada mulanya ibukota dibangun sebagai sebuah simbol dari lahirnya atau berdirinya sebuah wilayah dan juga sebagai sebuah simbol peradaban.

Di Indonesia, kawasan perkotaan dibedakan berdasarkan status administrasinya, yakni :

- a. Kawasan perkotaan berstatus administratif daerah kota;
- b. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten;
- c. Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan; dan
- d. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan (Tarigan, 2006).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti mengambil metode penelitian Kualitatif, dimana lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi, Metode Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono, 1997).

Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014) Observasi adalah dasar semua pengetahuan. Observasi dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bima.

Esterberg dalam Sugiyono (2014; 72) teknik wawancara ialah, merupakan

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti tidak menggunakan koesioner dalam melakukan proses wawancara, namun menyiapkan sebuah tema besar peranan kepada sumber data. Pertanyaan akan terus melebur berdasarkan proses wawancara sampai didapat informasi yang dibutuhkan.

Wawancara dilakukan dengan Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima, Ka. BAPPEDA Kab. Bima, KABAG Pemerintahan, Ketua DPRD Kabupaten Bima, CAMAT Setempat dan LSM Setempat. Menurut (Arkunto, 2006) dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, agenda, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Pencarian data dalam penelitian kualitatif juga dapat dilakukan tanpa harus melalui sumber data langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum peneliti membahas hasil penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan ibukota Kabupaten Bima, ada beberapa temuan/konsep penelitian dari penelitian terdahulu dan dasar perbedaan penelitian peneliti yaitu, Penelitian yang dilakukan oleh Nuristi, Dinartika Arnedo tahun (2015) dengan judul Implementasi

Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun) dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemindahan ibukota ke Wilayah Mejayan telah memperhatikan aspek penting keberhasilan suatu implementasi kebijakan walaupun dilakukan secara bertahap.

Sedangkan pengembangan wilayah ditinjau aspek strategis, teknis dan administratif telah berjalan dengan baik. Rekomendasi penting yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bagi Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun untuk mempercepat proses pembangunan di Wilayah Mejayan, perlu adanya sosialisasi terkait pemetaan geospasial, dukungan anggaran yang memadai dan konsistensi pengaturan zonasi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah terletak pada permasalahan yang begitu kompleks dari penelitian di atas menunjukkan aspek penting keberhasilan suatu implementasi dalam suatu pemindahan ibukota wilayah kabupaten, sedangkan dalam penelitian penulis meneliti dalam konteks masalah faktor yang mempengaruhi pemindahan

ibukota kabupaten serta menimbulkan pertanyaan besar dalam penelitian penulis yaitu mengapa terjadi faktor keterlambatan dalam proses pemindahan ibukota kabupaten.

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Azahra, Ma'arif (2016) dengan judul Alternatif Pengembangan Kecamatan Sape Sebagai Pusat Kegiatan Dibagian Timur Kabupaten Bima, NTB, dengan metode penelitian Analisis Kualitatif Deskriptif dengan dibantu analytical hirarchi process (AHP) dengan hasil Dengan posisi Kabupaten Bima bagian timur dan barat yang di tengah-tengahnya adalah wilayah pemerintahan Kota Bima, mengakibatkan jangkauan pelayanan semakin jauh dan biaya transport semakin meningkat, sehingga proses aglomerasi akan terjadi dengan sendirinya.

Alternatif Kecamatan Sape dapat dijadikan sebagai titik pusat DOB sudah cukup sesuai dengan melihat kondisi saat sekarang dan kedepannya. Berdasarkan dari kesiapan sarana prasarana dan fasilitas fisik, serta kemampuan ekonomi wilayah di bantu dengan kesiapan dari segi aksesibilitas yang sudah sebagian baik, keberadaan pelabuhan laut.

Perbedaan Penelitian penulis yang sangat mendasar adalah terletak pada hasil yang akan dicapai dalam hal ini penulis

mencari dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima baik yang nantinya hasil yang di capai adalah berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. Sedangkan dalam penelitian di atas di fokuskan hasil kebutuhan primer.

Sehingga hasil penelitian pada proses pemindahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima baik dari faktor letak geografis, faktor kependudukan, faktor kebijakan pemerintah, faktor politik maupun faktor historis atau sejarah pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima. Pada bab ini peneliti lebih banyak menggunakan data wawancara dengan aktor-aktor pemerintah daerah Kabupaten Bima yang di pilih secara tepat dalam menjawab persoalan-persoalan pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima.

Upaya pemerintah Kabupaten Bima dalam mempercepat pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima sudah melalui berbagai upaya namun berbagai persoalan sosial di berbagai wilayah juga harus di lebih diperhatikan karena isu yang berkembang di tatanan masyarakat Kabupaten Bima saat ini masih terkait degan isu kemiskinan. Tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Bima namun juga menjadi dampak perkembangan ekonomi

nasional di berbagai wilayah-wilayah di Indonesia

A. Proses Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima.

1. Pusat pemerintahan Ibukota Kabupaten Bima.

Mengenai pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima sudah menjadi arah gerak pemerintah Kabupaten Bima sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 Tentang pemindahan ibukota Kabupaten Bima dari Raba Kota Bima ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Kota Bima ini wilayahnya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bima yang antara lain Raba termasuk dalam wilayah Kota Bima. Dengan masuknya Raba menjadi bagian dan Kota Bima maka ibu kota Kabupaten Bima yang berlokasi di Raba wilayah Kota Bima perlu dipindah ke wilayah Kabupaten Bima.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai konsekuensi lahirnya kebijakan pembentukan Kota Bima melalui undang-undang No 13 Tahun 2002, maka untuk efektifnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dan percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru, pemerintah Kabupaten Bima telah menyusun Rencana Tata Ruang Ibukota Kabupaten Bima dengan membagi struktur ruang pusat pertumbuhan kota Kabupaten

Bima dalam 3 (tiga) bagian wilayah kota, yakni Desa Dadibou sebagai pusat kawasan pemerintahan, Desa Talabiu sebagai kawasan fungsi pendukung dan Desa Daru sebagai kawasan fungsi pelayanan sosial. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ian selaku Kabid Administrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 jam 10:15 adalah sebagai berikut :

“Pemindahan Pusat Pemerintah Kabupaten Bima sedang dalam proses pembangunan, ada 3 Desa bagian wilayah yang difokuskan dalam fokus pertumbuhan pusat ibukota Kabupaten Bima.”

Dari hasil wawancara dengan bapak Ian selaku Kabid Administrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima dapat di analisis bahwa proses pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima sedang berjalan atau sedang dalam proses pembangunan, dengan kata lain alokasi atau lokasi pusat pelayanan pemerintahan Kabupaten Bima sudah ditetapkan di Kecamatan Woha dan akan memfokuskan pada 3 (tiga) pembangunan kawasan yaitu pertama kawasan pusat pemerintahan, kedua pusat kawasan fungsi pendukung, dan ketiga adalah kawasan pusat fungsi pelayanan sosial. Dimana pusat Ibukota Kabupaten Bima ini berada di salah satu Kecamatan yang ada.

Upaya pemerintah Kabupaten Bima dalam mempercepat pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima sudah melalui berbagai upaya namun berbagai persoalan sosial di berbagai wilayah juga harus di lebih diperhatikan karena isu yang berkembang di tatanan masyarakat Kabupaten Bima saat ini masih terkait dengan isu kemiskinan. Tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Bima namun juga menjadi dampak perkembangan ekonomi nasional di berbagai wilayah-wilayah di Indonesia di Kabupaten Bima yaitu Kecamatan Wohu.

2. Kebijakan Perkotaan.

Pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan pelayanan yang efisien kepada masyarakat dan kebijakan ini juga mengacu pada dasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 650/989/IV/Bangda, tanggal 5 Juni 2000, tentang pedoman umum Penyusunan Program Dasar Pembangunan Perkotaan (PDPP)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima bahwa Kota Wohu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang mengemban fungsi dengan tingkat pelayanan skala regional dan kabupaten sebagai berikut :

a) Pusat pelayanan Pemerintahan;

b) Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala regional dan atau kabupaten;

c) Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

d) Pusat pelayanan umum dan sosial skala regional dan atau kabupaten; dan

e) Simpul transportasi.

Berdasarkan arahan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pesisir dan pulau-pulau kecil dalam RTRW Kabupaten Bima, Kecamatan Wohu (Desa Pandai, Donggobolo, Dadibou, Talabiu) merupakan zona yang memiliki Potensi perikanan budidaya (tambak) serta sebagai kawasan minapolitan yang berpusat di Desa Penapali. Potensi lainnya yang terdapat pada wilayah perencanaan adalah tambang Mangan, sehingga menjadikan kota wohu sebagai salah satu zona wilayah usaha pertambangan di Kabupaten Bima.

Melirik dari syarat dan proses pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima tidak terlepas dari unsur Disposisi, struktur birokrasinya, sumber dayanya dan komunikasinya baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat atau sebaliknya dari masyarakat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Bima, tidak hanya komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat namun pemerintah daerah Kabupaten Bima harus menjaga

komunikasi yang baik terhadap pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Karena tanpa dukungan pemerintah propinsi dan pusat tidak akan terjalin komunikasi srt a pengaruh kepada desposisi yang baik. Dari hasil wawancara dengan Bapak Mansykur S.H. selaku Kabid Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Bima pada Hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 jam 13:12 mengatakan bahwa.

“Pemerintah Kabupaten Bima, Khususnya bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Bima sudah menjalankan tugas dengan semestinya sesuai dengan Tupoksi nya sendiri. Pemerintah Kabupaten Bima mempunyai Kebijakan dalam pembangunan perkotaan secara yuridis..”

Dari pemaparan bapak Mansykur S.H. selaku Kabid Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Bima dapat di analisis bahwa komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bima sudah ada untuk melaksanakan proses pemindahan ibukota Kabupaten Bima dalam rangka mempercepat pembangunan pelaksanaan pemindahan Ibukota Kabupaten Bima. Sebab dalam pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak A.Rifaid selaku Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sedikit dapat dianalisis bahwa komunikasi yang baik

dengan pemerintah terhadap masyarakat sudah terjalin dengan baik dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima

1. Faktor Letak Geografis.

Pengaruh letak geografis terhadap pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten Bima bahwa letak geografis dapat di lihat dari gambaran jarak lokasi pusat pemerintahan yang baru dengan pusat pemerintahan yang lama, serta jarak dengan kota-kota yang ada disekitar lokasi pemilihan pusat Ibukota yang baru. Hal ini nantinya akan sangat menentukan interaksi antara wilayah-wilayah disekitar. Letak geografis Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima harus mengacu kepada analisis-analisis AMDAL maupun SWOT karena dalam menentukan lokasi harus melihat jarak kedekatan pelayanan kepada masyarakat bagaimana pelayanan itu bisa semakin dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat, sebab keutaman pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Ian selaku Kabid Admistrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima pada hari Kamis

tanggal 29 Maret 2018 jam 10:15 adalah sebagai berikut :

“Peran bagian Administrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima hanya menyiapkan lahan sarana dan prasarana melalui sub. Bagian pengadaan tanah dengan urusan RTRW adalah urusan BAPPEDA sedangkan teknis pembangunan adalah urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).”

Dari hasil wawancara dengan bapak Ian selaku Kabid Administrasi Pemerintahan Umum daerah Kab. Bima dapat di analisis bahwa secara administrasi pemisahan Kabupaten Bima dan Kota Bima sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 sedangkan usulan program pembangunan Ibukota Kabupaten Bima sebagaimana dijabarkan dari kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bima sesuai tertuang dalam RPJMD 2005-2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Bima dari Raba Wilayah Kota Bima ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima bahwa pemerintah harus segera mengimplementasikan pemindahan dan pembangunan ibukota Kabupaten Bima di lokasi yang baru.

Jika melihat dari penentuan lokasi pusat Ibukota Kabupaten Bima, pemerintah

Kabupaten Bima sudah melewati dan melakukan berbagai pertimbangan yang matang dalam menentukan lokasi pusat ibukota kabupaten, salah satunya adalah membentuk tim pengkaji lokasi ibukota Kabupaten Bima hingga akhirnya Kecamatan Woha di tunjuk sebagai pusat Ibukota Kabupaten Bima dengan rumusan hasil seminar sehari tentang lokasi ibukota kabupaten Bima di paruga parenta – Bima pada Sabtu, 17 Juni 2006 dengan merumuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan dan pemindahan ibukota kabupaten Bima ke lokasi yang baru pada prinsipnya bertujuan untuk lebih mengefektifkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu penetapan dan pemindahan ibukota Kabupaten Bima harus berdasarkan kepentingan masyarakat yang lebih besar dan berdimensi jangka panjang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sedapat mungkin dihindarkan dari kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, kelompok serta kepentingan elit politik yang sifatnya sesaat.
2. Pemindahan ibukota Kabupaten Bima ke lokasi baru harus memenuhi 3 syarat utama yaitu :

- a) Aspek normatif (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)
 - b) Aspek teknis (meliputi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan)
 - c) Aspek sosial, ekonomi dan politik (antara lain meliputi peningkatan publik service, kebutuhan, antisipasi pengembangan yang akan datang, pengembangan ekonomi, perluasan wilayah, pertumbuhan ekonomi, entitas, kelompok dan multikulturalisme).
3. Kriteria dalam pemindahan ibukota Kabupaten Bima berdasarkan masukan dari narasumber paling tidak harus memperhatikan kriteria/aspek sebagai berikut :
- a) Aspek tata ruang
 - b) Aspek aksesibilitas/keterjangkauan
 - c) Aspek penduduk
 - d) Aspek ketersediaan fasilitas
 - e) Aspek sosial ekonomi dan;
 - f) Aspek lain yang terkait
4. Hasil kajian tim pengkajian lokasi ibukota Kabupaten Bima yang telah mengakomodir kriteria seperti yang disebutkan pada poin tiga (3) diatas kemudian diperkaya dengan kriteria tambahan sesuai aspirasi masyarakat dan kajian pustaka (20 kriteria) menunjukkan bahwa Kecamatan Woha memiliki nilai (Scoring) tertinggi, diikuti secara berturut-turut oleh Kecamatan Bolo, Sape, dan Belo. Sehingga secara teknis Kecamatan Woha dapat direkomendasikan sebagai alternatif terbaik sebagai lokasi Ibukota Kabupaten Bima.
5. Dari kriteria yang dipergunakan oleh tim pengkajian lokasi ibukota Kabupaten Bima disarankan agar kriteria hasil poling melalui Bima Ekspres tidak dimasukkan sebagai kriteria pengkajian, tetapi dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rangka penetapan lokasi ibukota Kabupaten Bima.
6. Untuk memperoleh feedback yang lebih luas dari masyarakat guna penyempurnaan hasil kajian lokasi ibukota Kabupaten Bima, tim kajian lokasi ibukota Kabupaten Bima masih menerima koreksi, masukan, saran, serta pertimbangan dari berbagai kalangan sampai dengan 20 juni 2006.
7. Sesuai dengan pasal 7 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka untuk penetapan Kecamatan Woha sebagai

ibukota Kabupaten Bima perlu segera ditindaklanjuti dengan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Bima dan selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di teruskan ke Departemen Dalam Negeri agar dapat diproses lebih lanjut sehingga dapat ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP)

2. Faktor Kependudukan.

Faktor kependudukan adalah faktor pendukung yang bisa membantu percepatan pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima, ranah penduduk berarti membicarakan tentang sumber daya manusia (SDM) dukungan moril dari masyarakat dapat meningkatkan semangat membangun bagi pemerintah daerah dalam proses pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima yang administrasi sudah dilaksanakan faktor kependudukan suatu lokasi pusat ibukota juga menjadi penentu dalam keberhasilan suatu kebijakan pemerintah yang dimaksud faktor penduduk ialah yang mencakup tentang jumlah penduduk yang ada di lokasi baru dan kota-kota sekitar untuk mengetahui potensi interaksi yang akan terjadi selanjutnya adalah seberapa besar pengaruh mata pencaharian penduduk di lokasi pusat pemerintahan baru dan

seberapa besar dukungan Heterogenitas penduduk dari segi suku, agama, dan etnis di sekitar wilayah pusat pemerintahannya.

Pemindahan pusat pelayanan pemerintahan ibukota Kabupaten Bima menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Bima karena bagi masyarakat pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dekat dengan masyarakat hal ini di dukung dari bukti wawancara dengan bapak Chandra selaku CAMAT Kecamatan Wohu pada hari jum'at tanggal 13 April 2018 jam 14:00 beliau berangapan bahwa :

“saya sangat setuju dan mendukung pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima di Kecamatan Wohu ini, begitu juga dengan masyarakat pada umumnya.”

Dari hasil wawancara dengan bapak Chandra selaku CAMAT Kecamatan Wohu dapat di tarik analisis bahwa pemindahan pusat pelayanan pemerintah Kabupaten Bima pada umumnya mendorong dan mendukung kehadiran Pemerintah Daerah Kabupaten Bima sebab masyarakat juga akan bangga akan kehadiran Pemerintah Daerah tersebut, pengaruhnya sangat besar terhadap sektor ekonomi masyarakat perputaran ekonomi semakin meningkat, usaha-usaha baru akan hadir..

Jadi, jika berbicara mengenai hubungan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima dengan faktor kependudukan bahwa pada umumnya seluruh masyarakat sudah menerima dengan baik pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima di wilayah Kecamatan Woha, namun yang menjadi polemiknya adalah masyarakat sangat menyangkan pemindahan pusat ibukota Kabupaten atau pusat pelayanan masyarakat tak kunjung disegerakan, yang dimana penduduk mendesak pemerintah Kabupaten Bima untuk sesegera mungkin kantor Bupati itu untuk segera pindah. Karena jika kantor Bupati atau sekretariat Pemerintah Kabupaten Bima itu pindah maka Masyarakat sangat merasa senang dan gembira pemimpin daerahnya semakin dekat dengan masyarakatnya.

3. Faktor Kebijakan Pemerintah.

Komitmen pemerintah terhadap pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima jika benar pusat pelayanan pemerintah itu di rancang dan tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya tentang zona tata ruang yang mendukung apakah memungkinkannya kebijakan pemindahan pusat pelayanan pemerintahan di lokasi tersebut. Dari hasil wawancara dengan

bapak A.rifaid selaku Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada hari senin, tanggal 2 April 2018 jam 11:00 mengatakan bahwa :

“Pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima sudah menjadi ranah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bima sejak dulu, dan pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten Bima memfokuskan pada pembebasan lahan masyarakat, Sekretariat atau kantor bupati mestinya di tahun 2015, dan di janjikan kembali di tahun 2018 mendatang.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak A.Rifaid selaku Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat di analisis bahwa memang sejak pada tahun 2002 terjadi pemekaran Kota Bima dari induk Kabupaten Bima, namun pembangunan infrastruktur dimulai pada tahun 2014 dan akan diselesaikan sesuai target dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD tahun 2006-2025 dan setiap tahunnya.

Pemerintah Kabupaten Bima berkonsisten membangun tiga (tiga) Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) saja dari dana APBD maupun bantuan dana dari APBN maupun bantuan dari Provinsi. Dalam suatu kebijakan pembangunan wilayah pemerintah pada umumnya membuat suatu perencanaan

yang mendetail yang di kenal dengan Rencana Detail Tata Ruang atau di singkat (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan serta Rencana Tata Ruang Wilayah atau di singkat (RTRW) kawasan perkotaan WoHa pada Tahun 2014 – 2034.

4. Faktor Politik

Faktor politik merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kebijakan pemindahan pusat pelayanan ibukota Kabupaten Bima. Jika kita melirik beberapa kasus contoh di Indonesia menyiratkan bahwa kontribusi elit politik atau sang penguasa menjadi faktor dominan yang menentukan arah laju suatu kebijakan kepentingan politik suatu golongan dalam mencapai pemindahan pusat ibukota. Selanjutnya mengenai visi dan misi kepala daerah Kabupaten Bima, dalam hal ini adalah Bupati menjadi pengambilan keputusan akhir dalam sebuah kebijakan-kebijakan yang di ambil. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bahrain selaku Kepala Bagian Organisasi Pendayagunaan Aparatur (OPA) Kabupaten Bima beliau mengatakan bahwa :

“Dalam hal kebijakan faktor politik Pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima menjadi hak prograssif dari kepala daerah yaitu BUPATI.”

Dari hasil wawancara dengan bapak Bahrain selaku Kepala Bagian

Organisasi Pendayagunaan Aparatur (OPA) Kabupaten Bima dapat di analisis bahwa percepatan pemindahan atau keterlambatan pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima menjadi keputusan hak Kepala Daerah, seluruh instansi-instansi yang berada di ruang lingkup Kabupaten Bima yang saat ini berada di wilayah Kota Bima sepenuhnya sudah siap untuk pindah kalau infrastruktur kantor yang disiapkan di lokasi pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima yang berada di Kecamatan WoHa.

Mengenai isu politik bahwa keterlambatan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima atau lebih tepatnya saat ini kantor sekretariat atau kantor BUPATI itu disebabkan oleh ASN atau PNS yang kebanyakan masih berdomisili di Kota Bima dan tidak bersedia pindah ke lokasi pusat pelayanan ibukota Kabupaten Bima yang baru yang jaraknya tidak relatif dekat artinya jauh dari Kota Bima.

Jadi, jika berbicara mengenai hubungan Pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima dengan faktor politik bahwa tidak ada indikasi politik dari elit-elit politik terhadap perhambatan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima itu sendiri. Jika melirik pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Bima sedang dalam proses pembangunan, pemerintah Kabupaten

Bima menghimbau dan berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bima untuk bisa bersabar dan selalu mensupport proses pemindahan pusat ibukota kabupaten Bima yang saat ini dalam proses laju pembangunan.

5. Faktor Historis

Terbentuknya Kota Bima berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bima yang antara lain Raba termasuk dalam wilayah Kota Bima. Dengan masuknya Raba menjadi bagian dari Kota Bima maka ibu kota Kabupaten Bima yang berlokasi di Raba wilayah Kota Bima perlu dipindah ke wilayah Kabupaten Bima. Dan hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, serta sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Bima, Kecamatan Woha layak untuk dijadikan ibu kota Kabupaten Bima, karena semangat mendukung pengembangan ke masa depan, aksesibilitas, rentang kendali pemerintahan, dan dukungan lahan.

Pemindahan ibu kota kabupaten dari Raba wilayah Kota Bima ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima telah diusulkan oleh Bupati Bima kepada DPRD Kabupaten Bima dengan Surat Nomor 135/091/001/BAPPEDA tanggal 8 Agustus 2006 perihal Persetujuan Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Bima, telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bima berdasarkan

Keputusan Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 9 November 2006 tentang Persetujuan Penetapan Ibukota Kabupaten Bima.

Berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Bima tersebut, Bupati Bima sudah mengajukan permohonan kepada Gubernur NTB dengan surat Nomor 135/056/PEM/2007 tanggal 23 Mei 2007 perihal permohonan pemindahan dan penetapan lokasi ibukota Kabupaten Bima dan kemudian Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan surat Nomor 125/661/PEM tanggal 29 Juni 2007 mengajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memohon pemindahan dan penetapan lokasi ibu kota Kabupaten Bima. Dari hasil wawancara dengan bapak Bahrain selaku Kabag. Organisasi Pendayagunaan Aparatur Kabupaten Bima beliau mengatakan bahwa :

“Sejarah pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima sudah melalui tahapan-tahapan yang panjang, semua masalah perijinan-perijinan sudah dilalui oleh pemerintah Kabupaten Bima, sekarang tinggal bagaimana saja laju percepatan pembangunan bisa di tingkatkan lagi.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Bahrain selaku Kabag. Organisasi Pendayagunaan Aparatur Kabupaten Bima dalam kalkulasi usia, Kabupaten Bima telah melintasi perjalanan sejarah yang

amat panjang. Bahkan mengalami masa-masa timbul tenggelam yang dalam perspektif ilmu negara disebut teori timbul tenggelamnya negara. Menurut teori kekuasaan bahwa negara terbentuk karena kekuasaan. Orang kuatlah yang pertamanya mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana dikemukakan Kallikles dan Votaire bahwa raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil.

Begitu juga teori tenggelamnya negara seperti teori organis, teori anarkis, dan teori Marxis yang memandang bahwa negara adalah sebuah organisme dan tata paksa baik dengan kekerasan maupun tidak yang pada akhirnya akan hilang dengan sendirinya menurut syarat-syarat obyektifnya sendiri. Timbul tenggelamnya Kabupaten Bima terungkap dalam naskah kuno yang dimiliki Kerajaan Bima, Bo Sangaji Kai.

PENUTUP

Dalam pengimplemantasian pemindahan pusat ibukota dan pembangunan ibukota Kabupaten Bima di lokasi yang baru sedang dalam proses pembangunan infrastruktur dari 43 Organisasi Perangkat Daerah hanya 6 OPD yang sudah berada pada lokasi pusat pelayanan pemerintah Kabupaten Bima diantara yaitu : Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Dari latar belakang pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima yang melatar belakangi penghambatan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima adalah faktor anggaran, dimana dana yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur adalah hanya bersumber dari APBD. Dari kelima (5) faktor yang mempengaruhi pemindahan ibukota Kabupaten Bima yaitu faktor letak geografis, faktor kependudukan, faktor kebijakan pemerintah, faktor politik dan faktor historis/sejarah sudah berjalan dengan baik artinya mendukung dan mempengaruhi percepatan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima.

Hanya saja faktor penduduk atau dari masyarakat mengharapkan dan mendesak pemerintah kabupaten untuk sesegera mungkin percepatan pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima, agar tercapai pelayanan yang cepat dan tepat.

Saran yang dapat di berikan oleh penulis adalah Pemerintah Kabupaten Bima harus lebih meningkatkan percepatan pembangunan insfrastruktur kantor yang awalnya hanya 3 Organisasi

perangkat daerah pertahunnya, bisa di tingkatkan lagi lebih dari 3 pertahunnya. Organisasi Perangkat Daerah sehingga jangka waktu pembangunan infrastruktur tidak relatif lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M.F.U.2010. *Evaluasi Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah*. Tesis.
- Ahmad dan Abdul Hamid. 2008 . *Lembaga Keuangan Syariah* : PT. Bestari Buana Murni.
- Claval, P. 2000. *The European System of Capital Cities*. Geo Jurnal 51 (1/2), 73 -81.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Margono, 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Michigan Lean Consortium. 2013. *State of Michigan: Good Government Initiative* (internet). <http://michiganlean.org/page-1356647> (diakses 27 Oktober 2017)
- Myoe, M.A. 2006. *The Road to Naypyitaw : Making Sense of The Myanmar Government's Decision to Move its Capital*. Asia Research Institute National University of Singapore 79 (-), 1-19.
- Qi, D. 2008. *Early Capital Cities- The Key Simbol of Early Chinese Civilization*. Front.Hist.China 3 (1), 1 – 11.
- Rieseneder,F.B.2008. *Good Governance: Characteristics, Methods, and The Austrian examples*. Transylvanian Review of Administrative Sciences 24 (E), 26-52.
- Rustiadi, dkk. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi,Laksbang* Pressindo, Yogyakarta, hal. 41
- Siong, H.C. 2006. *Putrajaya- Administrative of Malaysia : Planning, Concept, and Implementation*. Suistainable Urban Development and Governance Conference SungKyunKwan University Seoul.
- S.H. Sarundajang, 2003. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya*.
- Syarif, A. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Fisik Kota Baubau*.Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Tarigan, R. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah* . Edisi Revisi. Penerbit: PT. Bumi Aksara.
- Tukiyat. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Bab 6: Pengantar Pengembangan Ekonomi Wilayah*. Jakarta: BPPT.
- Wusten, HVD.2000. *The Cityscape of European Capital Cities*. GeoJurnal 51 (-), 129 – 133.
- Peraturan Perundang-undangan :
- UU Nomor 13 Tahun 2002 *Tentang Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 *Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 *Tentang Pindahan Ibu Kota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima*
- Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 *Tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah*.